

IMPLEMENTASI PROGRAM ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN BALANGAN

(Studi Kasus Desa Mantuyan Kecamatan Halong)

Siti Asnah¹, Reno Affrian², Agus Surya Dharma³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Email : siti.asnah117@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan Bupati Balangan Nomor 100 Tahun 2021 mengatur pelaksanaan Program Eliminasi Malaria. Namun, ditemukan sejumlah kendala, seperti tidak adanya anggaran desa untuk program ini, kondisi sosial masyarakat yang kerap keluar-masuk hutan, dan belum terbentuknya organisasi informal pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi dan hambatan program di Desa Mantuyan, Kecamatan Halong, dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan melibatkan 7 informan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi program cukup baik dari segi kebijakan, sumber daya manusia, pendanaan, organisasi formal, respons pelaksana, serta kerja sama antar organisasi. Namun, kelemahan terdapat pada organisasi informal, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Faktor pendukung meliputi sarana prasarana, anggaran, dan kerja sama antar lembaga. Faktor penghambat meliputi rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya tenaga kesehatan, dan hambatan lingkungan ekonomi. Agar program lebih optimal, pemerintah desa disarankan meningkatkan edukasi berbasis komunitas, melibatkan tokoh masyarakat, dan mengaktifkan kader malaria serta gotong royong masyarakat dengan pendekatan komunikasi yang mudah dipahami.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Eliminasi malaria, Desa Mantuyan, Kabupaten Balangan

ABSTRACT

Balangan Regent Regulation Number 100 of 2021 regulates the implementation of the Malaria Elimination Program. However, several issues were identified, including the absence of village budget allocation for the program, the community's frequent activity in forest areas, and the lack of informal community empowerment organizations. This study aims to examine the implementation and obstacles of the program in Mantuyan Village, Halong District, using a descriptive qualitative approach with seven informants through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the program is moderately well-implemented in terms of policy, human resources, funding, formal organizations, implementers' response, and inter-organizational cooperation. Weaknesses were found in informal organizations and the social, economic, and political environments. Supporting factors include adequate facilities, funding, and institutional cooperation. Hindering factors involve low community awareness and participation, a lack of health workers, and economic challenges that sustain malaria transmission. To optimize the program, the village government is advised to enhance community-based education and malaria prevention efforts, particularly for people working in forest areas. Implementing agencies should involve community leaders, conduct interactive outreach, and use accessible local communication. Community participation should be strengthened through malaria volunteers and collective village action.

Keywords : Policy implementation, Malaria control program, Mantuyan Village, Balangan Regency

PENDAHULUAN

Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi parasit Plasmodium, yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Gejala umum yang ditimbulkan antara lain demam, menggigil, sakit kepala, serta mual. Anak-anak dan lanjut usia menjadi kelompok yang paling rentan, terlebih pada musim penghujan (Cowman et al., 2016; Sillehu & Utami, 2018). Secara global, pada tahun 2021 tercatat 247 juta kasus malaria dengan jumlah kematian mencapai 619.000 jiwa, di mana 76% di antaranya merupakan anak-anak di bawah lima tahun di wilayah Afrika (WHO, 2023). Di Indonesia, jumlah kasus menurun dari 226.364 pada tahun 2020 menjadi 94.610 kasus di tahun 2021, dengan sekitar 61,9% wilayah dinyatakan bebas malaria. Papua menjadi provinsi dengan insidensi tertinggi, yaitu 63,12 per 1.000 penduduk (Kemenkes RI, 2022). Pemerintah menargetkan eliminasi total malaria pada tahun 2030, selaras dengan komitmen global WHA 2007. Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan dikategorikan sebagai daerah dengan risiko tinggi, mengingat kondisi geografisnya yang didominasi hutan dan rawa. Meski demikian, pelaksanaan program eliminasi di daerah ini masih menghadapi kendala, antara lain belum adanya pendanaan dari desa, tidak terbentuknya organisasi masyarakat, serta aktivitas masyarakat yang kerap berada di hutan sehingga memperbesar risiko penularan. Peraturan Bupati Balangan No. 100 Tahun 2021 telah mengatur strategi eliminasi, namun implementasinya belum menunjukkan hasil yang optimal.

Sebagai dasar dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengacu pada beberapa studi terdahulu terkait implementasi kebijakan. Tri Wahono (2021) dalam penelitiannya meninjau pelaksanaan kebijakan eliminasi malaria di Kabupaten Pangandaran dan Pandeglang melalui pendekatan kualitatif, dengan membandingkan pelaksanaan di lapangan berdasarkan indikator Kepmenkes No. 293/MENKES/SK/IV/2009. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi sudah mengacu pada pedoman, namun belum sepenuhnya efektif. Salah satu inovasi penting ditemukan di Pandeglang dengan adanya pembentukan Posmaldes. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia serta lemahnya koordinasi lintas sektor akibat belum dijadikannya isu malaria sebagai prioritas. Ketiadaan regulasi daerah juga menjadi hambatan tersendiri (Wahono, 2021). Sementara itu, Pius Selasa (2017) menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan eliminasi malaria di seluruh Puskesmas Kota Kupang. Hasilnya memperlihatkan bahwa seluruh aspek pelaksanaan—penemuan kasus, tata laksana, pencegahan, edukasi, hingga penguatan SDM—telah dijalankan secara menyeluruh dengan capaian 100% di 11 Puskesmas. Keberhasilan ini mencerminkan kesiapan institusional daerah dalam mendukung upaya eliminasi malaria secara sistematis. (Selasa, 2017)

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai tindakan atau keputusan yang diambil oleh otoritas pemerintah untuk menyelesaikan persoalan publik. Menurut Jenkins, kebijakan merupakan rangkaian keputusan yang saling berkaitan, sementara Easton menggambarkannya sebagai proses alokasi nilai secara otoritatif dalam masyarakat. Dengan demikian, kebijakan publik mengacu pada upaya penyelesaian isu strategis yang memengaruhi kepentingan luas dan dirancang serta dilaksanakan oleh institusi yang memiliki legitimasi formal.

William Dunn (dalam Anggara, 2014) mengemukakan bahwa proses kebijakan publik terdiri atas lima tahap: (1) Penyusunan agenda, yaitu penentuan isu prioritas; (2) Formulasi kebijakan, penyusunan solusi alternatif; (3) Adopsi atau legitimasi kebijakan; (4) Implementasi oleh lembaga pelaksana; dan (5) Evaluasi efektivitas kebijakan. Sedangkan menurut Hoogerwerf (dalam Anggara, 2012), tujuan utama kebijakan publik antara lain menjaga ketertiban sosial, mendorong kemajuan

sektor strategis, menyelaraskan kegiatan sosial, serta mendistribusikan sumber daya secara adil dan efisien. (Anggara, 2014)

Implementasi kebijakan sendiri merupakan proses realisasi keputusan yang telah dirumuskan ke dalam tindakan nyata. Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi sebagai rangkaian aktivitas yang menghubungkan kebijakan dengan hasil yang diinginkan. Proses ini melibatkan interaksi aktor publik dan swasta demi mencapai target kebijakan. Mereka juga mengidentifikasi enam faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi, yakni: (1) tujuan kebijakan; (2) sumber daya; (3) karakteristik pelaksana; (4) sikap pelaksana; (5) komunikasi antar organisasi; serta (6) kondisi sosial-politik. Pressman dan Wildavsky menambahkan pentingnya koordinasi antar lembaga sebagai prasyarat keberhasilan implementasi. Sementara itu, Mazmanian dan Sabatier menyebut bahwa kejelasan tujuan, struktur kelembagaan, dukungan politik, serta keterlibatan publik menjadi faktor penentu utama. (Affrian, 2023)

Merilee S. Grindle membedakan dua dimensi penting dalam implementasi: isi kebijakan (*content*), mencakup sasaran, manfaat, pelaksana, dan sumber daya; serta konteks implementasi (*context*), yang meliputi aktor, lembaga, kekuasaan, dan kepatuhan. Matland mengembangkan kerangka *Ambiguity-Conflict Matrix* yang membagi implementasi ke dalam empat tipe: administratif, politis, eksperimental, dan simbolik. Sementara George C. Edward III mengidentifikasi empat faktor kunci keberhasilan: komunikasi yang efektif, sumber daya memadai, sikap pelaksana yang positif, serta struktur birokrasi yang mendukung.

Mengacu pada Perbup Balangan No. 100 Tahun 2021, strategi eliminasi malaria di daerah ini mencakup beberapa aspek utama, yakni: surveilans dan deteksi dini, penatalaksanaan penderita, penanggulangan kejadian luar biasa (KLB), pencegahan berbasis masyarakat, serta koordinasi lintas sektor. Tujuan akhir dari kebijakan ini adalah terciptanya wilayah bebas penularan malaria, penurunan angka kesakitan dan kematian, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Faktor-faktor yang memengaruhi penyebaran malaria di antaranya adalah gigitan nyamuk *Anopheles* yang membawa parasit *Plasmodium*, lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk seperti genangan air dan daerah berhutan, tingginya mobilitas penduduk ke wilayah endemis, serta keterbatasan akses pelayanan kesehatan dan kurangnya pengetahuan masyarakat. (Anonim, 2021)

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mantuyan, yang terletak di Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di Jalan Karang Paci dengan kode pos 71666. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa wilayah tersebut tergolong daerah endemis malaria dan merupakan salah satu sasaran utama dalam pelaksanaan Program Eliminasi Malaria di Kabupaten Balangan.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode yang berfokus pada pemahaman mendalam melalui penyajian deskriptif berupa kata-kata, kalimat, dan narasi, bukan angka-angka statistik. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Informasi diperoleh dari informan yang dipilih secara sengaja menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan jumlah sebanyak 7 orang. (Ibrahim, 2018)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam dengan informan kunci, serta dokumentasi terhadap data dan arsip yang relevan. Proses analisis data mengikuti model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan

Huberman, yang melibatkan tiga tahapan pokok, yaitu: kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

Untuk menjamin validitas dan keandalan data yang diperoleh, dilakukan serangkaian uji keabsahan data berdasarkan teknik yang disarankan oleh Sugiyono (2019). Teknik tersebut mencakup perpanjangan waktu pengamatan, peningkatan ketekunan dalam pengumpulan data, triangulasi sumber, teknik, dan waktu, analisis terhadap kasus negatif, penggunaan referensi pendukung, serta pemeriksaan ulang data kepada informan atau yang dikenal dengan member check. (Sugiyono, 2019)

PEMBAHASAN

Implementasi Program Eliminasi Malaria pada Desa Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan terimplementasi dengan cukup baik. Hal ini dapat diketahui dari indikator lainnya:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

a) Ukuran kebijakan,

Ukuran kebijakan adalah parameter atau indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau dampak dari suatu kebijakan publik. Ukuran kebijakan membantu pembuat kebijakan, pelaksana, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menilai apakah suatu kebijakan telah mencapai tujuan yang diinginkan, serta mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki.

Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa ukuran keberhasilan kebijakn tergolong baik, karena adanya penurunan angka penderita malaria dan tidak ditemukan lagi kasus penularan tersebut sesuai dengan peraturan bupati kabupaten balangan nomor 100 tahun 2021 tentang pelaksanaan Program Eliminasi Malaria Program Eliminasi Malaria di Desa Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, namun masyarakatnya masih bermata pencaharian di luar daerah seperti di hutan atau pegunungan untuk menambang emas, memotong kayu dan sebagainya kemungkinan itu penyebab penyakit malaria itu masih ada. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan Van Metter & Van Horn dalam Reno Affrian (2023: 30-32),

b) Tujuan kebijakan

Tujuan dalam Program Eliminasi Malaria merujuk pada seberapa jelas dan spesifik arah, sasaran, serta hasil yang ingin dicapai oleh program tersebut. Dalam konteks ini, kejelasan tujuan sangat penting agar semua pihak yang terlibat, seperti pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat Beberapa unsur kejelasan tujuan dalam Program Eliminasi Malaria meliputi: Tujuan Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai (Realistis), Relevan, Waktu yang Jelas. Dengan kejelasan tujuan yang baik, pelaksanaan program bisa lebih terarah, mudah dievaluasi, dan kemungkinan berhasilnya lebih tinggi. Jika kamu memerlukan contoh tujuan yang dirumuskan dengan baik dalam program eliminasi malaria, aku bisa bantu juga. Hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa ukuran keberhasilan kebijakn cukup baik, karena masyarakat sudah mulai mengetahui dan memahami cara menangani dan mencegah penyakit malaria itu dan juga bagaimana cara mengatasi kalau terkena penyakit malaria itu, namun masih adanya sebagian masyarakat yang kurang kesadaran terhadap pencegahan penyakit malaria dan abai terhadap pencegahan seperti masyarakat

yang tidak melaporkan dirinya ketika keluar masuk daerah endemis untuk melakukan aktivitas bekerja. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan Van Metter & Van Horn dalam Reno Affrian (2023: 30-32),

2. Sumber Daya

a) Sumber daya manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Program Eliminasi Malaria adalah seluruh tenaga kerja yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan eliminasi malaria di suatu wilayah. SDM ini mencakup berbagai profesi dan peran, mulai dari tenaga kesehatan, petugas lapangan, manajer program, peneliti, hingga kader masyarakat.

Hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan sumber daya manusia pelaksana tergolong cukup baik ini dilihat dari hasil wawancara adanya pelatihan dan bimbingan tentang Program Eliminasi Malaria dan juga beberapa kali melakukan update pengetahuan, namun promosi pencegahan ke masyarakat masih kurang karena masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui maupun memahami tentang pencegahan dan Program Eliminasi Malaria ini.

b) Sumber dana/finansial

Sumber Dana/Finansial dalam Program Eliminasi Malaria adalah segala bentuk pembiayaan atau dukungan keuangan yang digunakan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program eliminasi malaria.

Hasil wawancara, observasi dokumentasi dapat disimpulkan sumber dana/finansial dalam pelaksanaan Program Eliminasi Malaria di Desa Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan kurang baik karena dari desa tidak mengalokasikan anggaran untuk Program Eliminasi Malaria sehingga tidak sesuai dengan aturan perbup yang ada. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan Van Metter & Van Horn dalam Reno Affrian (2023: 30-32),

3. Karakteristik Agen Pelaksana

a) Organisasi formal

Organisasi formal dalam Program Eliminasi Malaria adalah struktur kelembagaan yang resmi dan terorganisir, yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang, dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang jelas untuk mengelola dan melaksanakan upaya pengendalian serta eliminasi malaria.

Hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan organisasi formal pelaksana Program Eliminasi Malaria di Desa Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan cukup baik dari segi penanganan yaitu puskesmas dan dinas kesehatan, namun dari pemerintah desa masih kurang menegasi aturan program ini ke masyarakat sehingga hasilnya masyarakat masih ada yang terkena penyakit malaria disebabkan ketidak sadaran terhadap pencegahan dan pemahaman Program Eliminasi Malaria ini seperti melaporkan diri mereka untuk ditindak saat ingin keluar masuk hutan rimba atau endemis. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan Van Metter & Van Horn dalam Reno Affrian (2023: 30-32),

b) Organisasi informal

Organisasi Informal dalam Program Eliminasi Malaria merujuk pada struktur atau jaringan yang tidak secara resmi diakui atau dibentuk dalam kerangka program tersebut, namun berperan penting dalam mendukung upaya eliminasi malaria.

Hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan organisasi informal pelaksana Program

Eliminasi Malaria di Desa Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan kurang baik, karena desa tidak adanya membuat organisasi informal dan posmaldes atau wadah pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan Van Metter & Van Horn dalam Reno Affrian (2023: 30-32),

4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*)

a) Respon pelaksana

Respon Pelaksana mengacu pada tindakan atau reaksi yang dilakukan oleh pelaksana program (seperti dinas kesehatan, petugas lapangan, kader, atau instansi terkait) dalam merespons situasi, tantangan, atau kebutuhan yang berkaitan dengan upaya pemberantasan malaria.

Hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan respon pelaksana Program Eliminasi Malaria di Desa Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan sudah cukup baik untuk respon pelaksananya maka dari itu dari agen pelaksana telah berusaha dengan maksimal dalam menjalankan program ini. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan Van Metter & Van Horn dalam Reno Affrian (2023: 30-32),

b) Pemahaman pelaksana

Pemahaman pelaksana terhadap kebijakan dalam Program Eliminasi Malaria merujuk pada sejauh mana pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program (seperti petugas kesehatan, kader masyarakat, kepala puskesmas, atau dinas kesehatan) memahami isi, tujuan, strategi, serta prosedur kebijakan eliminasi malaria yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait.

Hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan pemahaman pelaksana Program Eliminasi Malaria di Desa Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan cukup baik terhadap pemerintah dinas kesehatan dan pemerintah desa dalam segi pengimplementasian Program Eliminasi Malaria itu, namun dari pihak puskesmas kurang baik sebab dikarenakan mereka adalah agen penanganan penyakit malaria itu yang berdampak kemasyarakat dan juga kebijakan itu bukan dijadikan program namun jadi tugas pokok mereka dipuskesmas. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan Van Metter & Van Horn dalam Reno Affrian (2023: 30-32),

5. Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana

a) Kerjasama antar organisasi

Kerjasama antar organisasi terhadap kebijakan dalam Program Eliminasi Malaria adalah bentuk kolaborasi strategis antara berbagai lembaga baik pemerintah, non-pemerintah, organisasi internasional, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil yang bertujuan untuk merancang, mengimplementasikan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan serta intervensi yang efektif guna memberantas malaria.

Hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan kerjasama antar organisasi pelaksana Program Eliminasi Malaria di Desa Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan baik dari segi berkoordinasi dan berkerjasama dengan beberapa lintas program diantaranya adalah pengelola survailen vector dan juga orang lingkungan karena malaria ini sifatnya adalah pencegahan secara menyeluruh dan berkerjasama serta pemerintah desa dan dilihat dari tahun ke tahun ada penurunan signifikan data yang terkena malaria serta pengobatannya itu hampir seratus persen. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan Van Metter & Van Horn dalam Reno Affrian (2023: 30-32),

b) Dukungan organisasi lain

Dukungan Organisasi Lain Terhadap Kebijakan dalam Program Eliminasi Malaria adalah keterlibatan dan kontribusi dari berbagai lembaga di luar instansi pemerintah utama (seperti Kementerian Kesehatan) dalam mendukung kebijakan dan pelaksanaan program untuk mengeliminasi malaria.

Hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan dukungan organisasi lain Program Eliminasi Malaria di Desa Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan cukup baik kenapa begitu karena masih ada dukungan dari instansi seperti kementerian dan pemerintah daerah serta pihak swasta seperti perusahaan balangan cool dan adaro di balangan, namun hal itu masih kurang optimal dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan Van Metter & Van Horn dalam Reno Affrian (2023: 30-32),

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

a) Kondisi lingkungan sosial

Kondisi Lingkungan Sosial dalam Program Eliminasi Malaria merujuk pada berbagai faktor sosial dan budaya di suatu masyarakat yang dapat memengaruhi upaya pencegahan dan pemberantasan malaria. Faktor-faktor ini mencakup perilaku masyarakat, tingkat pendidikan, kebiasaan hidup, akses terhadap layanan kesehatan, serta struktur dan dukungan sosial yang ada.

Hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan kondisi lingkungan sosial Program Eliminasi Malaria di Desa Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan kurang baik disebabkan mata pencaharian mereka yang bekerja keluar masuk hutan seperti mencari kayu dan lainnya seperti ke daerah Kalimantan timur dan kurang nya antusias masyarakat terhadap kesadaran dan tidak ada melaporkan diri kalau keluar masuk hutan rimba untuk bekerja. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan Van Metter & Van Horn dalam Reno Affrian (2023: 30-32),

b) Kondisi lingkungan ekonomi

Kondisi lingkungan ekonomi dalam Program Eliminasi Malaria merujuk pada situasi dan faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi upaya dan keberhasilan Program Eliminasi Malaria di suatu wilayah. Ini mencakup berbagai aspek ekonomi yang dapat mempercepat atau menghambat program tersebut: Tingkat pendapatan masyarakat, Tingkat kemiskinan, Ketersediaan anggaran pemerintah untuk sektor kesehatan, Kegiatan ekonomi yang berisiko tinggi terhadap malaria (misalnya: pertanian, pertambangan, kehutanan).

Hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan kondisi lingkungan ekonomi Program Eliminasi Malaria di Desa Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan itu kurang baik dari segi lingkungan ekonomi karena sebagian masyarakat itu mata pencahariannya keluar masuk hutan rimba dan bersifat endemis seperti kekalimantan timur dan kota baru sehingga itu adalah faktor utama dalam penghambat Program Eliminasi Malaria ini. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan Van Metter & Van Horn dalam Reno Affrian (2023: 30-32),

c) Kondisi lingkungan politik

Kondisi lingkungan politik dalam Program Eliminasi Malaria mengacu pada situasi, kebijakan, komitmen, dan stabilitas politik suatu negara atau wilayah yang memengaruhi pelaksanaan dan keberhasilan program eliminasi malaria.

Hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan kondisi lingkungan politik Program Eliminasi Malaria di Desa Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan yang ditunjukkan kurang baik sebab kurang berpengaruh dan tidak terlihat pengaruh campur

tangan politik terhadap program eliminasi malaria. Hal tersebut kurang sesuai dengan teori yang dikemukakan Van Metter & Van Horn dalam Reno Affrian (2023: 30-32),

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Eliminasi Malaria pada Desa Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan meliputi faktor penghambat yakni :

1. Faktor Penghambat

- a) Desa tidak ada membuat organisasi informal dan posmaldes atau wadah pemberdayaan masyarakat didesa mantuyan

Tidak adanya organisasi informal dan wadah pemberdayaan masyarakat seperti pos malaria desa (POSMALDES) didesa mantuyan, menjadi salah satu kendala yang dihadapi Program Eliminasi Malaria di Desa Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan. menyebabkan masyarakat tidak memahami akan pencegahan dan penanggulangan penyakit malaria serta masih adanya masyarakat yang terdampak penyakit malaria, sehingga mempengaruhi implementasi Program Eliminasi Malaria didesa mantuyan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan dalam Program Eliminasi Malaria di Desa Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, karena tidak adanya organisasi informal dan wadah pemberdayaan masyarakat seperti pos malaria desa (POSMALDES) didesa mantuyan, menyebabkan masyarakat tidak memahami akan pencegahan dan penanggulangan penyakit malaria sehingga mempengaruhi implementasi Program Eliminasi Malaria didesa mantuyan.

- b) Kurangnya tenaga kesehatan dan keterbatasan jaringan dalam pelaksanaan program eliminasi malaria

Menyebabkan kurangnya data ataupun informasi kedesa-desa tentang masyarakat yang keluar masuk hutan endemis ini juga aspek penghambat terhadap pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa survei migrasi terhambat karena keterbatasan tenaga kesehatan, ketiadaan kader malaria terlatih, dan masalah jaringan komunikasi. Hal ini menyulitkan perolehan informasi aktivitas masyarakat di hutan dan berakibat lonjakan kasus malaria di Desa Mantuyan.

- c) Lingkungan ekonomi yang menyebabkan penyakit malaria tidak tereliminasi

Karena lingkungan ekonomi adalah faktor utama yang menjadi pengaruh masih adanya penyakit malaria tersebut disebabkan sebagian masyarakat bermata pencaharian didaerah endemic yaitu keluar masuk hutan rimba.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan Kondisi lingkungan ekonomi menjadi faktor utama dalam Program Eliminasi Malaria di Desa Mantuyan, Kabupaten Balangan. Penderita malaria umumnya bekerja di hutan untuk mencari uang. Observasi menunjukkan bahwa masyarakat bermata pencaharian keluar masuk hutan rimba yang endemis. Kondisi ini menghambat program eliminasi malaria.

2. Faktor pendukung

- a) Adanya sarana prasarana yang baik

Kenapa ini menjadi faktor pendukung karena dalam segi sarana prasarana seperti untuk alat transportasi mudah diakses disetiap desa sudah memiliki ambulance desa masing-masing untuk pengantaran hal darurat ataupun urgensi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana dalam pelaksanaan menjadi faktor pendukung Program Eliminasi Malaria di Desa Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, karena mempermudah masyarakat seperti dari akses alat transportasi.

- b) Kerjasama Antar Organisasi cukup bagus dalam pengemplementasian program eliminasi malaria

Kerjasama antar organisasi terhadap kebijakan dalam Program Eliminasi Malaria adalah bentuk kolaborasi strategis antara berbagai lembaga baik pemerintah, non-pemerintah, organisasi internasional, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil yang bertujuan untuk merancang, mengimplementasikan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan serta intervensi yang efektif guna memberantas malaria.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan kerjasama antar organisasi pelaksana Program Eliminasi Malaria di Desa Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan baik dari segi berkoordinasi dan berkerjasama dengan beberapa lintas program diantaranya adalah pengelola survailen vector dan juga orang lingkungan karena malaria ini sifatnya adalah pencegahan secara menyeluruh dan berkerjasama serta pemerintah desa dan dilihat dari tahun ke tahun ada penurunan seknifikan data yang terkena malaria serta pengobatannya itu hampir seratus persen.

- c) Anggaran dana yang baik menjadi pendukung

Karena segala bentuk pembiayaan atau dukungan keuangan yang digunakan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program eliminasi malaria.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa anggaran dana\finansial dalam pelaksanaan Program Eliminasi Malaria di Desa Mantuyan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan cukup baik untuk mendukung Program Eliminasi Malaria karena puskesmas dan dinas kesehatan sudah memiliki anggaran dana untuk Program Eliminasi Malaria ini yang mana itu langsung dibantu oleh pemerintah.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Eliminasi Malaria di Desa Mantuyan, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan telah berjalan cukup baik. Hal tersebut terlihat dari pencapaian sejumlah indikator yang menjadi fokus penelitian. Pertama, indikator ukuran dan tujuan kebijakan menunjukkan bahwa program ini telah memiliki ukuran keberhasilan dan tujuan yang cukup jelas dan terarah. Capaian dalam aspek ini dinilai cukup baik oleh para pelaksana program di lapangan. Kedua, indikator sumber daya menunjukkan bahwa dari sisi sumber daya manusia, program didukung oleh tenaga yang cukup kompeten, meskipun dalam jumlah yang masih terbatas. Dari aspek pendanaan, program dinilai memiliki alokasi anggaran yang cukup memadai dalam pelaksanaannya. Ketiga, indikator organisasi pelaksana menunjukkan bahwa struktur organisasi formal sebagai pelaksana program sudah terbentuk dan berfungsi dengan baik. Namun demikian, organisasi informal, seperti keterlibatan komunitas atau lembaga adat dalam mendukung program, masih dinilai kurang optimal. Keempat, dari indikator respons pelaksana, dapat disimpulkan bahwa pelaksana program memiliki respons dan pemahaman yang cukup baik terhadap tujuan serta strategi program yang dijalankan. Kelima, indikator kerja sama antarorganisasi memperlihatkan bahwa sinergi antar lembaga, baik lintas sektor maupun antar instansi terkait, sudah berjalan dengan cukup baik. Dukungan dari organisasi lain juga menjadi salah satu faktor penguat dalam pelaksanaan program. Keenam, indikator kondisi lingkungan sosial menunjukkan bahwa terdapat tantangan signifikan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik di wilayah ini belum sepenuhnya mendukung keberhasilan program, sehingga berpotensi menjadi hambatan yang perlu segera ditangani.

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi implementasi program dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok utama. Faktor pendukung meliputi: ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, koordinasi lintas sektor yang cukup baik, serta dukungan anggaran yang cukup mendukung keberlangsungan program. Sementara itu, faktor penghambat mencakup: rendahnya antusiasme dan pemahaman masyarakat terhadap pencegahan malaria, keterbatasan tenaga kesehatan, lemahnya jaringan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil, serta kondisi ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu penyebab sulitnya pengendalian kasus malaria secara menyeluruh.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi Program Eliminasi Malaria di Desa Mantuyan, penulis merekomendasikan beberapa hal. Pertama, pemerintah desa perlu meningkatkan edukasi dan penyuluhan berbasis komunitas mengenai bahaya malaria dan langkah-langkah pencegahannya, terutama kepada kelompok masyarakat yang bekerja di kawasan hutan. Kedua, pelaksana program perlu mengembangkan metode penyuluhan yang lebih interaktif dengan melibatkan tokoh masyarakat lokal. Ketiga, penyampaian informasi harus menggunakan media lokal dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat setempat. Keempat, partisipasi aktif masyarakat sangat penting, misalnya melalui penguatan peran kader malaria dan kegiatan gotong royong sebagai bagian dari gerakan bersama dalam pencegahan penyakit ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Anggara, S. (2014) *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Se.
- Anonim (2021) 'Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria'.
- Ibrahim, M.. (2018) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Selasa, P. (2017) 'Implementasi Kebijakan Eliminasi Malaria di Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Kupang'.
- Sugiyono (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahono, T. (2021) 'Studi Kualitatif Implementasi Kebijakan Eliminasi Malaria Di Wilayah Endemis Rendah Kabupaten Pangandaran dan Pandeglang. Di Litbangkes Pangandaran.'